

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA
TEBANG KECAMATAN PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS TAHUN 2013 - 2019**

Suniadi¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Handrisal³

Suniadisuni4@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Ha

ABSTRACT

The role of the village government in development must function optimally so that development can run optimally. above the village government can exercise its authority in the fields of government, development and community empowerment in realizing the independence and prosperity of the community. village government has a very influential role especially in efforts to create a climate that encourages the growth of initiatives and self-help in the village. For this reason a village needs development, the purpose of the development carried out by the government is to improve the living standards of rural communities. Various sectors continue to be developed to achieve these goals. To carry out village autonomy, all village potentials in the form of institutions, natural resources and human resources must be optimized. The purpose of this research is the role of the Village Government in the development of Tebang Village, Palmatak District, Anambas Islands Regency. The type of research used in this research is descriptive research (qualitative research). This research was conducted in the village of Tebang, Palmatak District, Anambas Islands Regency. The data analysis technique is qualitative, starting with data reduction interview, data presentation and verification. The results of the study showed that the role of the village government in the dimension of the stabilizer was quite instrumental, innovators were sufficiently instrumental, pioneers were less instrumental, Modernizers were less instrumental.

Keywords: Role, Village Governmen, Development

Penulis Suniadi⁴, Nur Aslamaturrahmah⁵, Handrisal⁶

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Abstrak

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, tugas Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatan dalam mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya di desa. Untuk itu sebuah desa memerlukan pembangunan, tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Berbagai sektor terus dikembangkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Untuk melakukan otonomi desa maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk peran Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Teknik analisis data adalah kualitatif, dimulai dengan melakukan reduksi data wawancara penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa dalam peran kepala desa tebang sudah cukup baik, ada dana yang sudah dipersiapkan dalam pembangunan Desa, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan tersebut, selain memberikan ide masukan serta aspirasi terhadap pembangunan dan masyarakat juga diharapkan menjaga pembangunan yang ada.

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Pembangunan

I. Pendahuluan

⁴ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

⁵ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

⁶ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Pembangunan yang optimal diperlukan peran pemerintah desa dalam berbagai sektor pembangunan yang di kembangkan. Pemerintah desa harus mampu memberdayakan tenaga dan anggaran belanja agar dapat di gunakan secara maksimal. Upaya untuk memberdayakan pemerintah desa harus dilaksanakan, karena pemerintah desa yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pembangunan. Peran serta pemerintah desa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana pemerintah desa sebagai pemerintahan yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan besifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi dalam pembangunan adalah kefakuman dan ketidakterlaksananya pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dijabarkan dalam Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78, 79 dan 80 bahwa dalam rangka perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Tebang disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya serta dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan di desa Tebang berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa jangka waktu perencanaan pembangunan untuk jangka panjang selama 20 Tahun, jangka menengah 6 Tahunan dan satu tahunan, disamping itu pembangunan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa bahwa perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif melalui tahapan pengkajian data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tatalaksana pemerintah desa, keuangan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan, atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan bersifat otonom, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX tentang Pembangunan Desadan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 79 maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/ kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKPDesa adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra

desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa yang diberimandat oleh Kepala Desa atau sebutan lain sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

Berdasarkan RKPDesa terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan di desa Tebang, secara rinci permasalahan yang harus diselesaikan adalah:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
 - a. Pemenuhan Operasional Pemerintah Desa
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Publik
 - c. Pemenuhan Penyusunan Dokumen Kelengkapan Desa
 - d. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Untuk Peningkatan Operasional Lembaga dan Kader
 - b. Pembangunan Jalan Lingkungan
 - c. Pembangunan Drainase Dan Saluran Irigasi Desa
 - d. Pembangunan Jaringan Air Bersih untuk Warga Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
 - a. Operasional Lembaga Desa
 - b. Pembina Keamanan Dan Ketertiban
 - c. Pembinaan Kerukunan Dan Gotong-royong Masyarakat Desa
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
 - a. Peningkatan Kapasitas Kader Teknik Lembaga Desa Lainnya)
 - b. Peningkatan Kelompok Nelayan bidang informasi

Berdasarkan data diatas terlihat masih banyak yang perlu dibenahi pemerintah desa dalam pembangunan, baik di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dan berdasarkan dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa), banyak program pembangunan yang belum terlaksana. Hanya beberapa program yang sudah terlaksana. Program terlaksana yang melibatkan partisipasi masyarakat yaitu pelatihan kelompok menjahit, tidak banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Dan beberapa program yang terlaksana lainnya seperti pengadaan tempat sampah, dan renovasi kantor desa yang tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang bersifat kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:29) “ metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:73) mengemukakan macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tak terstruktur.

Observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Sugiyono (2011:145) dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*. Berdasarkan jenis observasi yang telah dipaparkan di atas, peneliti memilih *non participant observation* dikarenakan peneliti hanya mengamati untuk mendapatkan data tanpa perlu mengikuti dan merasakan suka duka sumber data. Teknik analisa data yang digunakan adalah mengacu pada analisa selama dilapangan dengan model Miles and Huberman. Sugiyono (2014:91-98) menjelaskan tentang *Data Reduction* (reduksi data), *Display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (*verification*) sebagai berikut:

Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Tebang. Adapun rincian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Perangkat Desa	1
3.	BPD	1
4.	Tokoh Masyarakat	1
5.	Masyarakat Desa	3
Total		7

Sumber: Data Olahan Peneliti

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam penulisan ini menyajikan data secara deskriptif yaitu berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber yang sudah dipilih oleh penulis sesuai dengan data yang dibutuhkan dan dianggap mengetahui dan memahami mengenai Perananan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa. Dalam penulisan ini, penulis menggali data serta informasi bagaimana Perananan Pemerintah Desa

dalam pembangunan desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas kepada informan yaitu:

1. Kepala Desa(Bapak Januar Saputra)
2. Peranangkat Desa : Sekretaris Desa (Bapak Ramadi)
3. BPD (Bapak Amiruddin)
4. Masyarakat :
 - a. Ketua RW 03 : (Bapak Mattuzi)
 - b. Ketua RT 02 : (Bapak Hasbullah)
 - c. Ketua RT 06 : (Bapak Suparman)

Penulis memberikan batasan-batasan yang digunakan untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka penulis menetapkan indikator dan pengukurannya dari teori Sondang P. Siagian (2014) tentang Peranan terbagi menjadi 4 yaitu stabilisator, inovator, pelopor, dan modernisator.

a. Peranan Pemerintah Desa sebagai stabilisator

Pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berjalan lancar dan Pemerintah Desa mampu mengatasi hambatan yang terjadi didalam pembangunan sehingga stabilitas dalam pembangunan dari tahun ketahun baik pembangunan berkelanjutan maupun jangka menengah dapat terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan dan *key informan*, dapat diketahui adanya anggapan yang berbeda antara masing-masing informan mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembangunan, jadi disini penulis menarik kesimpulan bahwa Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas sudah cukup efektif namun dalam menyelesaikan hambatan dalam pembangunan. Pemerintah Desa terkesan lambat dalam mencari jalan keluar dari setiap hambatan yang terjadi dalam pembangunan, sehingga terdapat beberapa pembangunan yang tidak berjalan dengan semestinya.

b. Peranan Pemerintah Desa sebagai inovator

Perananan Pemerintah Desa bertindak sebagai Inovator yaitu pemerintah yang mampu menemukan hal-hal, ide, dan sistem yang baru dalam proses pembangunan. Penerapan inovasi dalam pembangunan dilakukan agar mendapatkan hal-hal baru maupun cara-cara baru dalam melaksanakan pembangunan. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan dan *key informan*, dapat diketahui adanya anggapan yang berbeda antara masing-masing informan mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam penerapan inovasi dalam pembangunan desa, penulis menarik kesimpulan bahwa PerananPemerintah Desa dalam pembangunan desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang maksimal dalam menciptakan hal-hal baru dalam pembangunan desa. Sehingga banyak pembangunan yang tidak berjalan dengan semestinya karena mengalami hambatan yang tidak mampu dipecahkan dengan cara lama dan membutuhkan hal-hal baru atau gagasan-gagasan baru dalam menyelesaikan hambatan agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar.

c. Peranan Pemerintah Desa sebagai pelopor

Pemerintah Desa harus mampu menjadi pelopor bagi masyarakat desa, selaku pelopor Pemerintah Desa harus mampu menjadi panutan bagi masyarakat desa. Dengan kata lain Pemerintah Desa harus mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan dan *key informan*, dapat diketahui adanya anggapan yang berbeda antara masing-masing informan mengenai Peranan Pemerintah Desa sebagai pelopor dalam pembangunan desa, penulis menarik kesimpulan bahwa Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas cukup maksimal dalam menggerakkan warga desa menjaga hasil dari pembangunan desa yang telah ada. Hanya saja Pemerintah Desa kurang dalam memelopori warga masyarakat di Desa tebang dalam pengetahuan dan sikap yang patut untuk dikembangkan, agar masyarakat terbiasa dengan sikap positif dan pengetahuan yang luas.

d. Peranan Pemerintah Desa sebagai modernisator

Pembangunan dilaksanakan pada setiap desa agar desa mampu mandiri dan kuat. Untuk menjadi mandiri desa harus memiliki pemerintah harus mampu membuat desa menjadi modern dengan mampu mengembangkan diri dan tidak menggantung diri pada hal apapun. Untuk itu Pemerintah Desa harus menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat agar masyarakat mampu menjadi mandiri dalam mengembangkan desa. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan dan *key informan*, dapat diketahui adanya anggapan yang berbeda antara masing-masing informan mengenai Peranan Pemerintah Desa sebagai modernisator dalam pembangunan, jadi disini penulis menarik kesimpulan bahwa Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang maksimal sebagai modernisator. Karena hanya terfokus pada wifi yang sudah menjadi hal biasa dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah Desa kurang dalam mencari teknologi terbaru untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat.

IV. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan dimensi-dimensi berikut ini:

1. Stabilisator

Pemerintah Desa sebagai stabilisator merupakan orang yang mampu menciptakan kestabilan dalam proses pembangunan desa. Dalam menjaga stabilitas pembangunan Pemerintah Desa harus mampu mengatasi setiap hambatan yang sedang terjadi dalam pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan serta keamanan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan kepada informan, penulis menganalisa Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dalam indikator Stabilisator sudah cukup berperan sebagai stabilisator dalam pembangunan desa.

2. Inovator

Pemerintah Desa sebagai Inovator adalah orang-orang yang mampu menemukan hal-hal, gagasan-gagasan, sistem-sistem yang baru dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan kepada informan, penulis menganalisa Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dalam indikator inovator cukup berperan dalam menggerakkan warga desa menjaga hasil dari pembangunan desa yang telah ada.

3. Pelopor

Pemerintah Desa sebagai Pelopor adalah orang-orang yang mampu menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan kepada informan, penulis menganalisa Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dalam indikator masih kurang berperan dalam menciptakan hal-hal baru dalam pembangunan desa.

4. Modernisator

Pemerintah Desa sebagai Modernisator adalah orang yang mampu mempertahankan pembangunan dengan cara-cara yang modern sehingga menghasilkan wilayah yang mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan kepada informan, penulis menganalisa Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas dalam indikator modernisator pada khususnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang dapat ditujukan kepada Pemerintah Desa Tebang Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas untuk melakukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus lebih banyak berperan dalam menggali potensi yang dimiliki desa, agar desa lebih berkembang dengan potensi yang dimiliki tanpa harus bergantung pada pemerintah daerah.
2. Pemerintah Desa juga harus mencari hal-hal baru dan gagasan-gagasan baru dalam proses pembangunan, agar banyak pembangunan yang dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan.
3. Pemerintah Desa seharusnya mengusahakan untuk melaksanakan pembangunan yang sudah di rencanakan, agar tidak terjadi penumpukan permasalahan yang timbul di akibatkan banyaknya pembangunan yang tidak terlaksana dan meminimalisir permasalahan yang timbul dalam desa.

V. Daftar Pustaka

Buku :

- Arifin, Syamsul. 2012. *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Asy'ari, Sapari Imam. 2007. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Cohen and Uphoff. 1977. *Rural Development Participation, Concept and Measure for Project Design, Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University.
- Djopari dan Solihah, Ratna. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Hal Utama dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Juliantara, Dadang. 2004. *Pembaharuan Kabupaten*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Levinson, David and Malvin Ember (eds), 1996. *Encyclopedia of Cultural Anthropology*. New York : American Reference Publishing Company, Inc.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenal Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Erlangga.
- Patton, Adri. 2005. *Peran Informal Leader dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rivai Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal, 2004, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Edisi Kedua), Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- Sastropetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung : Fokusmedia
- Sondang, Siagian. 2014. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sunyoto, Danang dan Burhanudin. 2011. *Perilaku Organisasi (cetakan Pertama)*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Thoha, Miftah, 2005, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Arif, Iman, dan Nurhasanah. 2018. *Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. Vol 6.

Gani, Lucyane dan Sri. 2016. *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo*. Vol. 1 No. 5.

Steffy Adelia Tindi. 2015. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng*.

Yuliana dan Deiby. 2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Studi kasus di Desa Laba Besar, Kecamatan Loloda Selatan)*.

Undang – Undang :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.